

TRANSFORMASI EKONOMI-POLITIK MASYARAKAT DESA BERBASIS DINAMIKA PENCIPTAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi Kasus: Penciptaan Sumber Daya Garam ke Industri PT. Garam Bipolo terhadap Ekonomi-Politik Masyarakat Desa Bipolo)

Economic and Political Transformation of Rural Communities Based on The Dynamics of Natural Resource Development (Case Study: The Development of Salt Resources into the PT. Garam Bipolo Industry and Its Impact on the Economic and Political Life of the Bipolo Village Community)

Rendi Mafer Ruyandi
Tapikap^{1*}

Rudi Rohi²

Yonatan H. Lopo³

^{*1-3}Program Studi Ilmu Politik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Nusa
Cendana

*email:
tapikaprendi@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Transformasi pemanfaatan ruang pesisir Desa Bipolo menjadi kawasan industri garam menunjukkan perubahan dalam cara sumber daya alam didefinisikan, dikelola, dan dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses *resource making* garam dan implikasinya terhadap transformasi ekonomi-politik masyarakat Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, meliputi pemerintah desa, pihak perusahaan, pekerja tambak garam, petani, dan tokoh masyarakat. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi, sedangkan data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *resource making* garam berlangsung melalui produksi pengetahuan, regulasi dan legalitas, serta relasi kekuasaan. Proses tersebut mengubah pemaknaan lahan pesisir menjadi ruang ekonomi strategis, memperkuat legitimasi pengelolaan perusahaan, dan menggeser kontrol sumber daya dari masyarakat menuju negara dan perusahaan. Kesimpulannya, industrialisasi garam mentransformasi struktur ekonomi masyarakat dari agraris dan subsisten menuju ekonomi berbasis upah sekaligus menciptakan pembatasan akses terhadap sumber daya tradisional dan ketergantungan ekonomi baru terhadap perusahaan.

Kata Kunci:

Resource Making, Garam,
Transformasi Ekonomi-Politik,
Teori Akses, Desa Bipolo.

Keywords:

Resource Making, Salt Industry,
Political-Economic Transformation,
Access Theory, Bipolo Village.

Abstract

The transformation of coastal space in Bipolo Village into an industrial salt production area reflects changes in how natural resources are defined, managed, and utilized. This study aims to analyze the process of salt resource making and its implications for the political-economic transformation of the Bipolo Village community, Sulamu District, Kupang Regency. The study employed a qualitative approach using a case study method. Research informants were selected through *purposive sampling* and consisted of village government officials, company representatives, salt-farm workers, farmers, and community leaders. Research instruments included interview guidelines, observation sheets, and documentation, while data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that salt resource making occurs through knowledge production, regulation and legalization, and power relations. These processes redefine coastal land as a strategic economic space, strengthen the legitimacy of corporate resource management, and shift resource control from local communities toward the state and the company. The study concludes that salt industrialization transforms the community's economic structure from an agrarian and subsistence-based system toward a wage-based economy while restricting access to traditional resources and creating new economic dependence on the company.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam pada umumnya dipahami sebagai bagian dari alam yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Pandangan tersebut cenderung menempatkan sumber daya sebagai sesuatu yang telah tersedia secara alamiah dan tinggal dimanfaatkan. Namun, pendekatan *resource making* melihat sumber daya secara berbeda. Sumber daya tidak semata-mata hadir karena karakteristik alamiahnya, tetapi menjadi sumber daya melalui proses sosial, ekonomi, politik, pengetahuan, teknologi, regulasi, dan relasi kekuasaan. Dalam perspektif Tania Murray Li (2014), suatu ruang atau objek alam dapat dikonstruksikan sebagai sumber daya ketika didefinisikan, dipetakan, dihitung, diberi nilai, serta dibuat dapat diintervensi secara teknis dan ekonomi. Perspektif tersebut penting digunakan untuk memahami perkembangan industri garam di Desa Bipolo. Desa Bipolo berada di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan dokumen penelitian, Desa Bipolo memiliki luas wilayah sekitar 41,47 km² dengan jumlah penduduk sekitar 2.274 jiwa. Mata pencaharian masyarakat sebelum berkembangnya industri garam terutama berada pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pelayaran, serta pemanfaatan sumber daya pesisir. Wilayah desa juga memiliki potensi kelautan, pertanian, kehutanan, dan kawasan pesisir yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, perubahan pemanfaatan ruang pesisir menjadi kawasan produksi garam menjadi fenomena penting. Wilayah yang sebelumnya dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat kemudian diredefinisi sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekonomi melalui pengembangan tambak garam. Proses tersebut menunjukkan bahwa nilai suatu ruang tidak semata-mata melekat pada kondisi alam, tetapi terbentuk melalui pengetahuan, kebijakan, investasi, teknologi, dan kepentingan ekonomi.

Sejarah pengembangan garam di Desa Bipolo menunjukkan bahwa gagasan pemanfaatan lahan untuk produksi garam berawal dari proses perencanaan pembangunan di tingkat desa. Dalam dokumen penelitian dijelaskan bahwa masyarakat dan pemerintah desa mulai melihat lahan yang sebelumnya direncanakan untuk pengembangan mangrove tetapi tidak berhasil sebagai alternatif lokasi produksi garam. Pengetahuan mengenai produksi garam juga diperoleh melalui pengamatan terhadap praktik produksi garam di Desa Oeteta. Gagasan tersebut kemudian dibawa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan berkembang menjadi rencana pengembangan tambak garam. Masuknya PT. Garam Bipolo kemudian menjadi titik penting dalam perubahan tersebut. Perusahaan membawa modal, teknologi, infrastruktur, serta orientasi produksi dalam skala industri. Garam yang sebelumnya belum diposisikan sebagai komoditas utama dalam struktur ekonomi masyarakat kemudian dikonstruksikan sebagai komoditas strategis yang berkaitan dengan kebutuhan garam industri nasional. Perusahaan juga melihat kondisi geografis Kabupaten Kupang, seperti curah hujan, struktur tanah, serta kualitas air laut, sebagai faktor yang mendukung pengembangan produksi garam. Perubahan tersebut tidak hanya menghasilkan perubahan dalam penggunaan ruang, tetapi juga mengubah struktur ekonomi dan relasi kekuasaan masyarakat. Sebelum industri berkembang, masyarakat mempunyai akses langsung terhadap sumber daya melalui pertanian, peternakan, aktivitas melaut, mencari ikan, kepiting, dan hasil laut lainnya. Setelah industri berkembang, sebagian masyarakat beralih menjadi buruh atau pekerja pada tambak garam.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui teori akses Ribot dan Peluso (2003). Teori akses memandang akses sebagai kemampuan memperoleh manfaat dari sumber daya, bukan sekadar kepemilikan formal. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh modal, teknologi, hubungan sosial, pengetahuan, legalitas, serta struktur kekuasaan. Dengan demikian, pertanyaan penting bukan hanya siapa yang memiliki sumber daya, tetapi siapa yang mampu mengakses, mengendalikan, dan memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut. Penelitian terdahulu mengenai *resource making* menunjukkan bahwa sumber daya alam seperti tanah, hutan, mineral, dan wilayah pesisir dibentuk melalui proses politik, ekonomi, teknologi, serta kebijakan negara. Li (2014), misalnya, menunjukkan bahwa tanah dikonstruksikan menjadi aset ekonomi

melalui pemetaan, sertifikasi, intervensi negara, dan pasar. Bridge (2009) menunjukkan bahwa mineral menjadi sumber daya melalui kombinasi pengetahuan, teknologi, eksplorasi, investasi, dan regulasi. Sementara itu, Peluso dan Vandergeest (2011) menunjukkan bahwa pembentukan kawasan hutan merupakan proses teritorial yang berkaitan dengan kontrol negara terhadap ruang.

Penelitian mengenai industri garam di Indonesia lebih banyak membahas persoalan pemberdayaan, pemasaran, korporatisasi, kesejahteraan petani, dan kebijakan garam. Baekhaki et al. (2018), misalnya, membahas perubahan pengelolaan garam rakyat menuju sistem korporasi dan menemukan adanya peningkatan produktivitas sekaligus ketergantungan terhadap modal dan kebijakan. Nugroho et al. (2020) menunjukkan lemahnya posisi tawar petani dalam struktur pemasaran garam. Sementara itu, penelitian Ningsih dan Laila (2021) menunjukkan bahwa pendapatan petani garam masih menghadapi ketidakstabilan akibat harga, sistem bagi hasil, dan ketergantungan terhadap kondisi alam.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat ruang penelitian untuk menghubungkan proses penciptaan sumber daya dengan transformasi ekonomi-politik masyarakat pada tingkat desa. Penelitian mengenai garam umumnya melihat aspek ekonomi, pemberdayaan, pemasaran, atau kebijakan, sedangkan penelitian ini menempatkan penciptaan sumber daya sebagai proses yang sekaligus membentuk kembali akses, kontrol ruang, relasi kekuasaan, dan struktur ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan: Bagaimana proses penciptaan komoditas garam menjadi garam industri yang bernilai ekonomi dan berimplikasi terhadap perubahan ekonomi-politik masyarakat Desa Bipolo?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses resource making sumber daya garam serta menjelaskan implikasinya terhadap perubahan ekonomi-politik masyarakat Desa Bipolo.

KERANGKA TEORI

Resource Making

Konsep resource making dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Tania Murray Li (2014). Li menolak pandangan bahwa sumber daya merupakan sesuatu yang telah tersedia secara alamiah dan tinggal ditemukan. Sebaliknya, sumber daya dibentuk melalui proses yang melibatkan pengetahuan, teknologi, kebijakan, pasar, dan relasi kekuasaan. Suatu objek alam menjadi sumber daya ketika objek tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang bernilai dan dapat diintervensi. Dalam proses tersebut berlangsung penyederhanaan terhadap kompleksitas sosial dan ekologis, kemudian ruang tersebut diarahkan pada fungsi tertentu. Proses resource making juga dapat menghasilkan exclusion, yaitu pembatasan terhadap pihak tertentu dalam mengakses sumber daya.

Dalam penelitian ini, resource making dianalisis melalui tiga dimensi utama:

Produksi pengetahuan, yaitu proses pendefinisian dan pemaknaan wilayah sebagai sumber daya. Regulasi dan legalitas, yaitu proses pemberian legitimasi hukum dan administratif terhadap pengelolaan sumber daya. Relasi kekuasaan, yaitu hubungan antaraktor yang menentukan siapa yang mempunyai kemampuan untuk menguasai, mengakses, dan memperoleh manfaat dari sumber daya.

Teori Akses

Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya. Akses berbeda dengan kepemilikan karena seseorang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya tanpa memiliki hak kepemilikan formal terhadap sumber daya tersebut. Akses dipengaruhi oleh berbagai mekanisme, antara lain legalitas, modal, teknologi, pengetahuan, hubungan sosial, jaringan, dan kekuasaan. Oleh sebab itu, teori akses digunakan untuk

mengetahui siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya garam, melalui mekanisme apa manfaat tersebut diperoleh, serta aktor mana yang mempunyai kemampuan lebih besar dalam mengontrol distribusi manfaat. Dalam konteks Desa Bipolo, teori akses digunakan untuk melihat perubahan dari akses langsung masyarakat terhadap sumber daya menuju akses yang dimediasi oleh perusahaan dan negara. Perubahan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi, relasi kuasa, eksklusi sumber daya, dan ketergantungan ekonomi baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berusaha memahami secara mendalam proses sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam penciptaan sumber daya garam serta perubahan kehidupan masyarakat Desa Bipolo. Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena tersebut dalam konteks nyata. Lokasi penelitian berada di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi tempat berkembangnya aktivitas industri tambak garam PT. Garam Bipolo dan menjadi ruang terjadinya perubahan ekonomi-politik masyarakat.

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala desa, pihak manajemen PT. Garam Bipolo, pekerja tambak garam, petani, dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatannya dengan objek penelitian.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi masyarakat maupun aktor terkait keberadaan PT. Garam Bipolo. Observasi dilakukan terhadap aktivitas masyarakat, proses produksi tambak, serta hubungan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan, catatan, dan dokumentasi lapangan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi berdasarkan fokus penelitian, kemudian disusun secara naratif untuk menemukan pola hubungan antara resource making, akses, transformasi ekonomi, dan relasi kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penciptaan Sumber Daya Garam di Desa Bipolo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya garam di Desa Bipolo tidak muncul secara otomatis sebagai komoditas industri. Proses tersebut berlangsung melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan lembaga adat. Lahan pesisir yang sebelumnya digunakan secara terbatas atau dipandang sebagai ruang yang belum produktif mulai didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki nilai ekonomi. Proses tersebut dimulai melalui produksi pengetahuan mengenai potensi wilayah. Masyarakat memperoleh pengetahuan awal melalui pengamatan terhadap praktik produksi garam di Desa Oeteta. Pengetahuan tersebut kemudian berkembang menjadi gagasan pemanfaatan lahan pesisir Desa Bipolo untuk produksi garam.

Sebagaimana disampaikan oleh mantan Kepala Desa Bipolo:

“Awal-awal kami tidak tau tentang sumber daya garam, kami hanya liat di desa tetangga yaitu desa Oeteta cara dong buat garam.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan awal mengenai garam bukan berasal dari proses teknologi yang sepenuhnya eksternal, tetapi juga berkembang melalui proses belajar sosial dan pengalaman masyarakat.

Gagasan tersebut kemudian dibawa dalam proses Musrenbangdus dan Musrenbangcam. Dengan demikian, pengetahuan mengenai potensi garam mulai masuk ke dalam wacana pembangunan desa. Lahan yang sebelumnya direncanakan untuk pengembangan mangrove tetapi tidak berhasil kemudian dipandang sebagai alternatif untuk tambak garam. Dalam perspektif Li (2014), proses tersebut menunjukkan bahwa alam tidak langsung menjadi resource. Diperlukan proses pendefinisian, pemetaan, penghitungan, dan pemberian nilai terhadap ruang. Dalam kasus Bipolo, proses tersebut menghasilkan perubahan cara pandang terhadap lahan pesisir: dari ruang hidup dan ruang yang kurang produktif menjadi ruang produksi ekonomi.

Produksi Pengetahuan

Produksi pengetahuan merupakan tahap penting dalam resource making. Pengetahuan yang membentuk sumber daya garam di Desa Bipolo berasal dari beberapa sumber, yaitu pengetahuan lokal masyarakat, pengetahuan pemerintah, serta pengetahuan teknis perusahaan. Pengetahuan lokal dibentuk melalui pengalaman masyarakat terhadap kondisi lingkungan, musim, tanah, dan wilayah pesisir. Pengetahuan tersebut memungkinkan masyarakat melihat bahwa kondisi alam Bipolo mempunyai karakteristik yang mendukung produksi garam.

Pemerintah kemudian memperkuat pengetahuan tersebut melalui wacana pembangunan. Garam mulai diposisikan sebagai komoditas yang dapat meningkatkan ekonomi daerah, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendukung kebutuhan nasional. Sementara itu, perusahaan membawa pengetahuan teknis mengenai produksi garam modern, kualitas garam industri, teknologi tambak, dan distribusi pasar. Dengan demikian, terjadi pertemuan antara tiga bentuk pengetahuan: lokal, pemerintah, dan teknokratik perusahaan. Namun, ketiganya tidak memiliki kekuatan yang sama. Pengetahuan formal dan teknokratik cenderung memiliki posisi lebih dominan karena didukung oleh data, teknologi, modal, dan legitimasi kebijakan.

Hal ini menunjukkan bahwa produksi pengetahuan juga merupakan proses politik. Aktor yang mempunyai kemampuan memproduksi dan mengendalikan pengetahuan mempunyai kemampuan lebih besar dalam menentukan bagaimana ruang didefinisikan dan digunakan. Dengan demikian, resource making garam di Desa Bipolo dimulai bukan hanya dari keberadaan air laut dan kondisi iklim, tetapi dari perubahan cara memandang ruang. Pengetahuan mengubah wilayah pesisir menjadi sesuatu yang dapat dihitung, direncanakan, diinvestasikan, dan diproduksi.

Regulasi dan Legalitas dalam Penciptaan Sumber Daya Garam

Setelah wilayah pesisir didefinisikan sebagai sumber daya potensial, proses resource making dilanjutkan melalui regulasi dan legalitas. Negara mempunyai peranan penting dalam memberikan legitimasi formal terhadap pemanfaatan ruang dan pengembangan industri. Dalam kasus Desa Bipolo, pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pengembangan industri garam sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan garam nasional. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa pengembangan tambak dilakukan dengan dukungan pemerintah serta kementerian terkait. Pemerintah dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka ruang bagi perusahaan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya. Kebijakan nasional mengenai swasembada garam menjadi salah satu dasar legitimasi bagi ekspansi produksi garam.

Regulasi kemudian memberikan perubahan penting terhadap status ruang. Lahan yang sebelumnya berada dalam ruang sosial masyarakat mulai masuk ke dalam sistem pengelolaan formal. Perusahaan memperoleh dasar legal untuk melakukan produksi, membangun infrastruktur, serta mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam sistem pasar. Namun, legalitas formal tidak selalu berarti distribusi kekuasaan yang setara. Masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses

perangkat hukum, informasi, modal, dan proses administratif dibandingkan perusahaan. Akibatnya, legalitas dapat memperkuat posisi aktor yang memiliki sumber daya ekonomi dan politik lebih besar. Lembaga adat juga memiliki peran dalam proses tersebut. Tokoh ulayat Desa Bipolo menjelaskan bahwa pada awalnya masyarakat mengusulkan agar lahan tersebut dibagi kepada masyarakat untuk dikelola sendiri. Namun karena pertimbangan kemampuan produksi dan pengelolaan, lahan kemudian diarahkan kepada pihak perusahaan. Dalam kesepakatan tersebut juga terdapat tuntutan agar tenaga kerja berasal dari masyarakat desa dan adanya pembagian manfaat bagi masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa legalitas pengelolaan garam merupakan hasil interaksi antara hukum negara, kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga adat. Namun dalam struktur tersebut, negara dan perusahaan mempunyai kapasitas formal dan ekonomi yang lebih besar.

Relasi Kekuasaan dalam Resource Making

Dimensi ketiga adalah relasi kekuasaan. Penciptaan sumber daya garam tidak berlangsung dalam ruang yang netral, tetapi melibatkan aktor dengan kepentingan dan kapasitas yang berbeda. Terdapat empat aktor utama dalam proses tersebut, yaitu pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga adat. Pemerintah memiliki kekuasaan melalui regulasi, izin, dan kebijakan pembangunan. Perusahaan mempunyai kekuatan melalui modal, teknologi, kemampuan produksi, dan akses pasar. Masyarakat memiliki legitimasi sosial dan historis terhadap ruang hidup, sedangkan lembaga adat memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat.

Namun, distribusi kekuasaan tersebut tidak seimbang. Pemerintah mempunyai legitimasi formal, sedangkan perusahaan memiliki modal dan teknologi. Masyarakat memiliki keterbatasan dalam modal dan kekuasaan formal. Akibatnya, masyarakat cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan perusahaan dan pemerintah. Perusahaan juga memperoleh posisi penting karena menjadi penyedia lapangan kerja. Ketika sebagian masyarakat bergantung pada pekerjaan di tambak garam, perusahaan bukan hanya menjadi aktor ekonomi, tetapi juga mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif teori akses, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan *bundle of powers*. Perusahaan mempunyai akses terhadap modal, teknologi, informasi, pasar, dan legalitas. Negara memiliki regulasi dan legitimasi. Sementara masyarakat mempunyai akses yang lebih terbatas sehingga kemampuan mereka untuk mengontrol sumber daya menjadi berkurang. Dengan demikian, *resource making* menghasilkan bukan hanya komoditas baru, tetapi juga struktur kekuasaan baru.

Transformasi Ekonomi Masyarakat: Dari Agraris ke Industri

Salah satu perubahan paling nyata setelah berkembangnya industri garam adalah perubahan struktur ekonomi masyarakat. Sebelum adanya industri, masyarakat Desa Bipolo menggantungkan kehidupan pada pertanian, peternakan, serta pemanfaatan hasil laut. Masyarakat juga mencari ikan, kepiting, siput, dan hasil pesisir lainnya sebagai sumber penghidupan.

Mantan Kepala Desa Bipolo menjelaskan

“Dulu itu masyarakat memang kebanyakan petani sawah, ada juga yang biasa pilaut suka cari kepiting, ikan untuk jual untuk cari hidup.”

Setelah industri garam berkembang, sebagian masyarakat mulai bekerja sebagai buruh tambak dan pekerja industri. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari ekonomi subsisten menuju ekonomi berbasis upah. Bagi sebagian masyarakat, perubahan tersebut memberikan manfaat nyata. Pekerja memperoleh pendapatan yang lebih rutin sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seorang pekerja menyampaikan bahwa keberadaan PT.

Garam memberikan lapangan pekerjaan dan memungkinkan masyarakat memperoleh gaji secara berkala. Dengan demikian, industri menciptakan peluang ekonomi baru. Namun, perubahan tersebut juga mengubah posisi masyarakat dalam sistem produksi. Sebelumnya masyarakat mempunyai kontrol langsung terhadap sebagian sumber daya yang mereka gunakan. Setelah industrialisasi, mereka memperoleh manfaat terutama melalui hubungan kerja dengan perusahaan. Perubahan ini dapat dipahami sebagai pergeseran dari direct access menuju dependent access. Masyarakat tetap memperoleh manfaat dari sumber daya, tetapi manfaat tersebut diperoleh melalui hubungan kerja dan bergantung pada keberadaan perusahaan.

Perubahan Relasi Kuasa dan Kontrol Sumber Daya

Transformasi ekonomi juga diikuti perubahan relasi kuasa. Sebelum industri berkembang, masyarakat mempunyai kontrol relatif lebih besar atas ruang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akses terhadap lahan dan wilayah pesisir didasarkan pada praktik sosial, hubungan masyarakat, dan legitimasi lokal. Setelah industri masuk, kontrol terhadap ruang menjadi lebih formal dan terpusat. Negara memberikan legitimasi melalui regulasi, sementara perusahaan mengendalikan produksi melalui modal, teknologi, dan manajemen. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa resource making merupakan proses redistribusi kekuasaan. Ketika ruang dikonstruksikan sebagai sumber daya industri, aktor yang mempunyai kemampuan mengelola sumber daya tersebut memperoleh posisi lebih besar. Dalam konteks teori akses, masyarakat kehilangan sebagian kemampuan untuk menentukan penggunaan ruang secara langsung. Mereka tetap dapat memperoleh manfaat, tetapi manfaat tersebut bergantung pada keputusan perusahaan dan kebijakan pemerintah. Karena itu, transformasi industri tidak hanya menghasilkan perubahan pekerjaan, tetapi juga mengubah posisi politik masyarakat dalam struktur pengelolaan sumber daya.

Dualitas Dampak: Inklusivitas dan Eksklusivitas

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak industri garam bersifat dualistik. Pada sisi inklusivitas, industri memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Pekerjaan tersebut menyediakan pendapatan yang lebih rutin dibandingkan sebagian aktivitas tradisional yang sangat dipengaruhi musim dan kondisi alam.

Namun pada sisi eksklusivitas, perubahan fungsi ruang menyebabkan berkurangnya akses terhadap sumber daya tradisional. Wilayah yang sebelumnya digunakan untuk menangkap ikan, mencari kepiting, siput, dan aktivitas pesisir lainnya menjadi bagian dari kawasan industri. Dengan menggunakan teori akses, kondisi tersebut dapat disebut sebagai access exclusion. Masyarakat kehilangan sebagian kemampuan untuk mengakses sumber daya yang sebelumnya dapat mereka manfaatkan secara langsung. Dualitas tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pertumbuhan pendapatan atau jumlah lapangan kerja. Peningkatan akses ekonomi melalui pekerjaan industri dapat berjalan bersamaan dengan berkurangnya akses terhadap sumber daya lain. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat perlu dilihat tidak hanya dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan berbagai sumber penghidupan.

Ketergantungan Ekonomi Baru

Dampak lanjutan dari transformasi tersebut adalah terbentuknya ketergantungan ekonomi baru. Sebelum industri, masyarakat memiliki beberapa sumber penghidupan. Mereka dapat bertani, beternak, menangkap ikan, mencari kepiting, atau memanfaatkan sumber daya pesisir. Keragaman sumber penghidupan tersebut membuat masyarakat mempunyai sejumlah alternatif ketika salah satu sektor mengalami masalah. Setelah industri berkembang, sebagian

masyarakat semakin bergantung pada perusahaan sebagai sumber pekerjaan dan pendapatan. Akses ekonomi berubah dari kontrol langsung terhadap sumber daya menjadi akses melalui hubungan kerja dengan perusahaan.

Ketergantungan tersebut memberikan keuntungan sekaligus kerentanan. Selama perusahaan beroperasi dan menyediakan lapangan pekerjaan, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi. Namun ketika produksi menurun atau kesempatan kerja berkurang, masyarakat dapat mengalami kesulitan karena sebagian akses terhadap sumber penghidupan tradisional telah berkurang. Dengan demikian, industri menciptakan apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai *dependent access*. Masyarakat mempunyai akses terhadap manfaat sumber daya, tetapi akses tersebut bergantung pada keputusan aktor yang mengontrol sumber daya.

Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap posisi tawar masyarakat. Ketika pilihan pekerjaan alternatif semakin sedikit, masyarakat menjadi lebih bergantung pada perusahaan dan cenderung mempunyai posisi tawar yang lebih rendah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penciptaan sumber daya garam di Desa Bipolo sesuai dengan argumen utama *resource making* bahwa sumber daya bukan sesuatu yang sepenuhnya alamiah. Keberadaan laut, lahan pesisir, iklim kering, dan kondisi tanah memang menjadi prasyarat ekologis, tetapi faktor-faktor tersebut belum otomatis menghasilkan komoditas garam industri. Diperlukan produksi pengetahuan untuk mengidentifikasi potensi wilayah, regulasi untuk memberikan legitimasi, teknologi untuk mengubah potensi menjadi produksi, serta modal dan pasar untuk menjadikan garam sebagai komoditas industri.

Dengan demikian, proses yang terjadi di Desa Bipolo dapat digambarkan sebagai:

Potensi alam → Produksi pengetahuan → Pendefinisian ruang → Kebijakan dan legalitas → Investasi dan teknologi → Produksi garam industri → Perubahan akses → Transformasi ekonomi-politik.

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa penciptaan sumber daya sekaligus merupakan proses penciptaan relasi sosial baru. Dalam perspektif Li (2014), proses tersebut juga berkaitan dengan *exclusion*. Ketika suatu ruang dikonstruksikan sebagai sumber daya ekonomi, diperlukan pengaturan mengenai siapa yang boleh mengakses ruang tersebut dan bagaimana ruang digunakan. Di Desa Bipolo, perubahan tersebut terlihat dari pergeseran akses masyarakat terhadap wilayah pesisir. Sementara itu, teori akses Ribot dan Peluso (2003) membantu menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai kemampuan lebih besar untuk memperoleh manfaat dari sumber daya. Perusahaan tidak hanya memiliki posisi karena penguasaan ekonomi, tetapi juga karena memiliki akses terhadap teknologi, modal, jaringan, pasar, dan legalitas. Dengan demikian, transformasi ekonomi-politik Desa Bipolo tidak dapat dipahami sekadar sebagai perubahan pekerjaan dari petani menjadi buruh. Perubahan tersebut merupakan perubahan struktur hubungan masyarakat dengan sumber daya. Sebelumnya masyarakat memperoleh manfaat melalui akses langsung, sedangkan setelah industrialisasi akses semakin dimediasi oleh perusahaan dan negara. Temuan ini juga menunjukkan adanya paradoks pembangunan. Industri garam dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, tetapi pada waktu yang sama dapat mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya tradisional. Oleh sebab itu, industrialisasi sumber daya perlu dilihat melalui dua sisi: kemampuan menciptakan manfaat ekonomi dan kemampuan mempertahankan akses serta posisi tawar masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan sumber daya garam di Desa Bipolo merupakan proses sosial, ekonomi, dan politik yang tidak berlangsung secara alamiah. Garam menjadi sumber daya industri melalui serangkaian

proses yang melibatkan produksi pengetahuan, regulasi dan legalitas, teknologi, investasi, pasar, serta relasi kekuasaan antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga adat. Dimensi pertama, yaitu produksi pengetahuan, menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari perubahan cara pandang terhadap wilayah pesisir. Pengetahuan lokal mengenai kondisi wilayah bertemu dengan pengetahuan pemerintah dan pengetahuan teknis perusahaan sehingga lahan pesisir kemudian dipandang sebagai ruang yang memiliki potensi ekonomi untuk produksi garam.

Dimensi kedua, yaitu regulasi dan legalitas, menunjukkan bahwa negara mempunyai peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap perubahan pemanfaatan ruang. Kebijakan pembangunan dan pengembangan garam nasional menjadi bagian dari proses yang membuka akses perusahaan terhadap pengelolaan sumber daya. Dimensi ketiga, yaitu relasi kekuasaan, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aktor. Negara mempunyai kekuatan regulatif, perusahaan memiliki modal, teknologi, dan akses pasar, sedangkan masyarakat memiliki legitimasi sosial dan historis terhadap ruang tetapi memiliki instrumen formal dan ekonomi yang lebih terbatas. Proses tersebut menghasilkan transformasi ekonomi-politik masyarakat Desa Bipolo. Struktur ekonomi yang sebelumnya berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan pemanfaatan hasil laut berubah menuju sistem ekonomi industri berbasis upah. Perubahan tersebut memberikan manfaat berupa lapangan pekerjaan dan pendapatan yang lebih rutin bagi sebagian masyarakat.

Namun, transformasi tersebut juga menghasilkan dampak eksklusif berupa berkurangnya akses terhadap sumber daya tradisional. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya mempunyai akses langsung terhadap ruang pesisir dan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Akibatnya, terbentuk ketergantungan ekonomi baru terhadap perusahaan. Masyarakat memperoleh manfaat dari sumber daya garam terutama melalui hubungan kerja, sementara kontrol terhadap produksi dan distribusi berada pada perusahaan dan didukung oleh regulasi negara. Dengan demikian, resource making di Desa Bipolo tidak hanya menghasilkan komoditas garam industri, tetapi juga merekonfigurasi struktur ekonomi, akses sumber daya, dan relasi kekuasaan masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya pembangunan industri yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat, akses masyarakat, posisi tawar, dan keberlanjutan sumber penghidupan lokal.

REFERENSI

- Anas, Z. (2021). Pemberdayaan petani garam dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Kropoh Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep. *Jurnal Pembangunan Sosial*.
- Baekhaki, K., et al. (2018). Korporatisasi garam rakyat: Dinamika transisi sosial, ekonomi dan ekologi petambak garam. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Bernstein, H. (2010). *Class dynamics of agrarian change*. Fernwood Publishing.
- Bridge, G. (2009). *Material worlds: Natural resources, resource geography and the material economy*. Geography Compass.
- Bridge, G. (2014). *Resource geographies I: Making carbon economies, old and new*. Progress in Human Geography.
- Colajanni, A., et al. (2025). *Resource making and political projects: Rethinking extraction beyond nature*. Political Geography.
- Harvey, D. (2003). *The new imperialism*. Oxford University Press.
- Kaha. (2019). Potensi produksi garam dan ekonomi masyarakat Desa Bipolo. *Media NTT*, 12 Juli.
- Kaharuddin. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Eksplorasi fenomena sosial*. Deepublish.

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). Laporan komoditas strategis: Garam nasional. KKP RI.
- Li, T. M. (2014). *Land's end: Capitalist relations on an indigenous frontier*. Duke University Press.
- Marx, K. (1867). *Capital: A critique of political economy* (Vol. I). Otto Meissner.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.).
- Nazir, M. (2017). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Y. (2020). Kekuasaan dalam kebijakan publik Indonesia: Analisis multidimensi. *Jurnal Kebijakan Nasional*.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Peluso, N. L., & Vandergeest, P. (2011). Political forests: The emergence of territorialization in Southeast Asia. *Journal of Peasant Studies*.
- Polanyi, K. (1944). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Beacon Press.
- Rahardjo, A. (2012). *Garam sebagai resource base dalam ekonomi masyarakat pesisir*. LIPI Press.
- Ribot, J., & Peluso, N. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*.
- Salampessy, A. (2020). Akses masyarakat terhadap sumber daya alam dalam struktur kekuasaan lokal. *Jurnal Sosial Ekologi*.
- Satria, A., & Sano, Y. (2018). Making coastal resources: Marine policy, state power, and local practices in Indonesia.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Tsing, A. L. (2005). *Friction: An ethnography of global connection*. Princeton University Press.
- Wati, M. Y., et al. (2015). Strategi PT Garam dalam menghadapi impor dan implikasinya terhadap petambak garam rakyat. *Jurnal Ekonomi Kelautan dan Perikanan*.
- Yin, R. K. (2011). *Case study research: Design and methods* (4th ed.).
- Zimmermann, E. W. (1951). *World resources and industries*. Harper & Brothers.